



**ARAHAN
RAPAT PERSIAPAN PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
(PMPRB) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN
BKKBN**

Jakarta, 21 April 2020

Yang kami hormati;

- 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN**
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN**
- 3. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
BKKBN**
- 4. Tim Reformasi Birokrasi Unit Eselon I**
- 5. Jajaran Inspektorat Utama**

Assalammu'alaikum wr. wb.

**Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita
semua,**

**Bapak/Ibu seluruh undangan dan peserta yang
berbahagia,**

**Marilah kita senantiasa mengucapkan puji
syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, atas**

berkat rahmat dan hidayah-Nya, pada pagi ini kita dapat berkomunikasi kembali dalam Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020 di lingkungan BKKBN secara virtual.

Terimakasih saya ucapkan atas partisipasi seluruh undangan, ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di BKKBN, terutama bagi Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku Tim Pengarah RB BKKBN, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Pelaksana dan Pokja RB BKKBN dan Para Tim RB masing-masing Unit Eselon I yang telah berupaya optimal melaksanakan PMPRB tahun 2019 sehingga nilai indeks RB BKKBN tahun 2019 naik sebesar 3,05 poin menjadi 71,75 (BB) dari tahun sebelumnya yaitu 68,70 (B). Saya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Inspektorat Utama yang telah berupaya untuk dapat menyelenggarakan kegiatan ini.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

BKKBN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian telah melaksanakan kebijakan

nasional Reformasi Birokrasi sejak tahun 2011. Proses RB tersebut telah membuat BKKBN menerima tunjangan kinerja pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2012 sebesar 42% dan ada kenaikan tarif tunjangan kinerja pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 menjadi 57%. Sampai dengan tahun 2019, BKKBN belum berhasil menaikkan kembali nilai tunjangan kinerja disebabkan indeks RB BKKBN Tahun 2019 baru sebesar 71,75 di bawah target indeks RB Nasional sebesar 75.

Dari hasil evaluasi RB tahun 2019 oleh Kementerian PAN dan RB, diketahui pelaksanaan RB di BKKBN masih terdapat beberapa kekurangan yaitu:

1. Reformasi Birokrasi pada tingkat unit Eselon I dan Unit Kerja ZI WBK/WBBM masih dianggap sebagai penugasan semata dan belum melekat pada pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Belum semua pegawai paham dan dapat menginternalisasikan nilai-nilai organisasi (Cerdas, Tangguh, Kerjasama, Integritas dan Ikhlas/CETAK TEGAS) dengan baik.

3. SOP yang ada belum disesuaikan dengan peta proses bisnis yang terbaru.
4. Manajemen SDM yang dilakukan belum dapat dipastikan untuk menghasilkan SDM yang kompeten di seluruh jajaran organisasi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dalam mendukung pencapaian kinerja dikarenakan:
 - a. Kinerja individu belum sepenuhnya mencerminkan tugas pokok dan tanggung jawabnya karena belum dilakukan penjabaran kinerja (*cascading* kinerja) dari level organisasi yang diturunkan secara berjenjang sampai level pelaksana.
 - b. Manajemen kinerja individu belum dilakukan secara efektif sehingga kekurangan dan kelebihan pegawai belum teridentifikasi secara baik untuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan karir pegawai.
5. Dari sisi pelayanan publik terdapat kekurangan:
 - a. Standar pelayanan, pelayanan terpadu, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan

masyarakat belum diterapkan secara merata pada seluruh unit kerja pelayanan.

- b. Pelayanan publik masih belum didukung inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemberian pelayanan oleh BKKBN.
6. Hasil survei internal integritas jabatan, masih terdapat 23 orang pegawai (18,55%) dari 124 responden BKKBN yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
 7. Hasil survei eksternal terkait persepsi anti korupsi dan pelayanan publik mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hasil survei persepsi anti korupsi menunjukkan indeks 3,55 dari skala 4 sedangkan tahun sebelumnya menunjukkan indeks 3,56. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

- b. Hasil survei persepsi pelayanan publik menunjukkan indeks 3,37 dalam skala 4 sedangkan tahun sebelumnya menunjukkan indeks 3,40. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.

Pada tahun 2020 ini kita memasuki periode Roadmap ketiga (2020-2024) dengan sasaran hasil tahun 2024 adalah “Menjadi Pemerintahan Berkelas Dunia” yang ditandai dengan indikator tidak terjadinya tindak pidana korupsi, tidak ada penyimpangan keuangan negara, program dan prioritas kerja pemerintah selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik berjalan dengan baik, penggunaan waktu jam kerja sangat efektif dan produktif, penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan dan hasil-hasil pembangunan dapat secara nyata dinikmati masyarakat (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja dan pro pengurangan kemiskinan).

Beberapa ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RB yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi, Nilai SAKIP, Opini BPK, Indeks Kelembagaan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Profesionalitas ASN, dan *Public Service Index* (kualitas akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan integritas). BKKBN menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 80.

Bapak/Ibu yang berbahagia,

Dengan memperhatikan hasil evaluasi KemenPAN dan RB tahun 2019, saya mengharapkan segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan-temuan MenPAN dan RB sebagai berikut:

1. Seluruh pimpinan PTM dan PTP berkomitmen penuh untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan memimpin langsung pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
2. Menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024 yang selaras dengan

Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 dan mengintegrasikannya dengan Renstra BKKBN 2020-2024.

3. Seluruh Tim Pelaksana dan Pokja RB serta Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada seluruh Unit Kerja termasuk Perwakilan BKKBN agar menyusun rencana kerja pada area perubahan RB yang selaras dan diintegrasikan pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Saya mengharapkan seluruh Perwakilan BKKBN menjadi Unit Percontohan Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
4. Agen perubahan pada masing-masing unit kerja menyusun rencana aksi perubahan dengan menginternalisasikan budaya kerja CETAK TEGAS dengan indikator yang terukur.
5. Menginternalisasikan *quick wins* Tahun 2020 sebagai arah perubahan yang dicanangkan BKKBN kepada seluruh pegawai secara berjenjang, sehingga seluruh pegawai meningkat

pemahamannya dan terlibat aktif dalam program reformasi birokrasi.

6. Masing-masing unit kerja membuat inovasi berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi terutama inovasi terkait pelayanan publik sehingga dapat memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat pengguna layanan BKKBN serta dapat meningkatkan kinerja BKKBN.
7. Mendokumentasikan hasil perubahan (*reform*) yang nyata yang telah dilakukan terkait delapan area perubahan reformasi birokrasi dan mengkomunikasikan hasil dan perubahan-perubahan tersebut kepada seluruh stakeholder BKKBN. Pada saat dilakukan evaluasi eksternal oleh KemenPAN dan RB pada bulan Juni s.d Oktober 2020 nanti, agar Tim Pelaksana RB BKKBN dan seluruh Unit Kerja mengidentifikasi, merumuskan, dan mempersiapkan hasil-hasil *reform* yang telah BKKBN lakukan disertai bukti dukung yang memadai untuk dipaparkan kepada KemenPAN dan RB sehingga KemenPAN RB yakin bahwa BKKBN telah melakukan perubahan-perubahan secara signifikan.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan sesuai dengan arah dan roadmap yang telah ditetapkan, maka dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*) dan kemudian dilakukan evaluasi eksternal oleh KemenPAN dan RB.

Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional di tahun 2020 berdampak juga pada Instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian tahun 2020 lebih banyak berfokus dan memberikan bobot tinggi pada hasil-hasil yang nyata dari perubahan (*reform*) yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama memperhatikan hal-hal yang akan dibahas pada rapat persiapan PMPRB BKKBN Tahun

2020 agar dapat menjadi perhatian dan acuan bagi Tim Pelaksana, Pokja RB, Tim RB unit Eselon I dan para Asesor PMPRB dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Marilah bersama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya, dengan ini Kegiatan Rapat Persiapan PMPRB BKBN Tahun 2020 ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kepala BKKBN,

dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).